



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGUATAN UPAYA PELINDUNGAN KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL INDONESIA

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Rahmat Sawalman
Analisis Legislatif Ahli Pertama
rahmat.sawalman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Nelayan, termasuk juga pembudidaya dan petambak, merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya Indonesia untuk membangun ekonomi biru. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan di Indonesia tahun 2023 mencapai lebih dari 2 juta orang, dan 85% adalah nelayan kecil. Hingga saat ini, upaya perlindungan kesejahteraan nelayan masih menghadapi tantangan dari berbagai aspek, di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, akses pasar, permodalan, dan kurangnya kapasitas sumber daya.

Selain faktor tersebut, kebijakan Pemerintah di sektor kelautan dan perikanan juga memengaruhi kesejahteraan nelayan. Salah satu contohnya adalah tuduhan *anti-dumping* (AD) yang baru-baru ini dilayangkan kepada Indonesia oleh American Shrimp Processors Association (ASPA). Petisi ASPA yang diajukan ke U.S. Department of Commerce (USDOC) pada 25 Oktober 2023 menuduh Indonesia melanggar aturan AD dan *countervailing duties* (CVD) terkait impor udang. *Dumping* terjadi ketika eksportir menjual produknya di luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar domestik. Tindakan ini biasanya disikapi oleh negara importir dengan mengenakan tarif *anti-dumping*. Dalam kasus ini, penerapan tarif tersebut telah menyebabkan penurunan ekspor udang, yang berdampak besar pada mata pencaharian sekitar 46.590 petambak dan ratusan ribu pekerja yang terlibat dalam rantai pasokan udang. Dampak dari penerapan tarif ini sangat luas. Bagi petambak kecil, penurunan permintaan internasional menyebabkan kelebihan pasokan di pasar lokal dan turunnya harga udang. Petambak yang tidak memiliki diversifikasi pasar atau akses ke pasar internasional sangat rentan, karena mereka kesulitan menjual hasil panen mereka. Penurunan volume ekspor ini juga memperparah kondisi ekonomi yang sudah rentan, sehingga menambah tantangan di sektor ini.

Kebijakan Pemerintah lainnya yang menjadi perhatian para nelayan adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang akan diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan ini membagi wilayah perairan Indonesia menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dari jumlah tersebut, hanya tiga zona yang diperuntukkan bagi nelayan tradisional, sementara zona lainnya dialokasikan untuk investor domestik dan asing serta zona *spawning and nursery ground*. Akses yang makin terbatas ini berpotensi mengurangi jumlah tangkapan ikan nelayan kecil. Kondisi ini diperparah dengan adanya dampak luas perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola migrasi ikan. Akibatnya, nelayan kecil sering kali harus melaut lebih jauh, bahkan ke luar zona yang diizinkan untuk mendapatkan ikan. Namun, dengan ukuran kapal yang biasanya di bawah 10 gross ton (GT), nelayan kecil menghadapi keterbatasan jarak tempuh, membuat mereka sulit bersaing dengan kapal-kapal besar. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelabuhan juga menjadi kendala, karena nelayan kesulitan mendaratkan hasil tangkapannya. Pasar yang tersedia juga masih terbatas, sehingga sulit bagi nelayan kecil untuk segera menjual ikan mereka. Tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, nelayan berisiko kehilangan hasil tangkapan mereka, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama yang terkoordinasi guna melindungi kesejahteraan nelayan kecil. *Pertama*, pemerintah harus fokus pada peningkatan infrastruktur, dengan menyesuaikan dukungan sesuai kebutuhan nelayan di berbagai wilayah. Bantuan kapal perlu memerhatikan karakteristik masing-masing wilayah untuk memastikan kapal dapat digunakan secara efektif oleh nelayan. *Kedua*, pemerintah perlu membuka akses pasar bagi nelayan kecil, memastikan hasil tangkapan mereka cepat terserap karena umumnya kapal nelayan kecil tidak memiliki sarana penyimpanan hasil tangkapan untuk jangka waktu lama. Pemerintah harus memastikan pelabuhan-pelabuhan dapat menyerap dan membeli hasil tangkapan mereka. *Ketiga*, penguatan kapasitas dan pemberdayaan terhadap nelayan harus menjadi prioritas. Perhatian khusus perlu diberikan pada pemberdayaan perempuan dan pemuda. Penguatan kelembagaan nelayan juga penting agar mereka dapat bersaing di tingkat nasional maupun global. *Keempat*, pemerintah perlu mendorong asuransi bagi nelayan, yang saat ini masih kurang masif dibandingkan asuransi pertanian, meskipun risiko yang dihadapi nelayan sangat tinggi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa nelayan kecil dapat mengakses fasilitas asuransi tersebut, memberikan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi mata pencaharian mereka.

Atensi DPR

Berbagai tantangan yang dihadapi nelayan menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk dapat mengatasinya. DPR RI melalui Komisi IV perlu mendorong pemerintah mengedepankan kebijakan kelautan dan perikanan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPR RI dapat berfokus pada beberapa hal, *pertama* memastikan penyediaan bantuan sarana dan prasarana dilakukan tepat sasaran dan tepat guna sehingga memberi manfaat bagi nelayan. *Kedua* mendorong mitra kerja terkait untuk menambah jumlah pelabuhan milik pemerintah yang dapat menyerap dan mengelola hasil tangkapan. Terakhir, memastikan adanya penguatan kapasitas nelayan, khususnya nelayan kecil, secara berkelanjutan. Adapun untuk pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat memastikan mitra kerja terkait memiliki kecukupan dana untuk menjalankan kebijakan tersebut dan mengedepankan akuntabilitas dalam implementasinya.

Sumber

cnbcindonesia.com, 2 September 2024;
industri.kontan.co.id, 3 September 2024;
kompas.id, 6 Juni, 2 September 2024;
liputan6.com, 2 September 2024; dan
tvonenews.com, 2 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.